

Rancangan Akhir RENSTRA 2025 – 2029

**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju**

Oleh :

Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.

Plt. Kadis KOMINFOSIP Kab. Mamuju

**Disampaikan pada Acara Forum RENSTRA Lintas Perangkat Daerah
Mamuju, 21 Oktober 2025**

Dokumen Perencanaan Daerah

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



RPJPD



RPJMD



RKPD

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



RENSTRA PD



RENJA PD

PERANGKAT DAERAH

Menyusun

Mengkoordinasikan

BAPPERIDA

Menyusun



- PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, PASAL 16 Ayat 1 :**
- Perangkat Daerah menyusun **RENSTRA** Perangkat Daerah dan **RENJA** Perangkat Daerah
 - Dalam rangka penyusunan **RENSTRA** Perangkat Daerah dan **RENJA** Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan **BAPPERIDA** dan pemangku kepentingan

Dokumen Perencanaan Daerah

Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029

Dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek Pembangunan, Pemerintahan, Pelayanan Publik, maupun Pemberdayaan Masyarakat

(Lampiran INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025)

KREATIF Point 5

**Digitalisasi Pemerintahan
dan Optimalisasi
Pelaksanaan e-Government**



Visi



Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH.,M.Si
BUPATI MAMUJU



YUKI PERMANA, ST
WAKIL BUPATI MAMUJU

**MAMUJU
KEREN**

(Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman)

Misi

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
4. Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi



**DISKOMINFOSIP
MAMUJU**

Tujuan RENSTRA DISKOMINFOSIP

Misi 1 :

**Menyelenggarakan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik**

Sasaran RPJMD :

**Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan
Berbasis Elektronik**

Indikator Sasaran :

**Indeks Sistem Pemeintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)**



**Tujuan RENSTRA
DISKOMINFOSIP :**

**Optimalisasi
Pelaksanaan
e-Government dengan
Mewujudkan
Transformasi Digital
yang Aman Berbasis
Data**

Indikator Tujuan :

**Indeks Sistem Pemeintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sasaran RENSTRA DISKOMINFOSIP

Sasaran RENSTRA :

- Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik bagi Masyarakat**
- Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan**
- Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah**
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator Sasaran RENSTRA :

- Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik (%)**
- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%)**
- Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)**
- Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (%)**
- Nilai AKIP (Predikat)**

Keterkaitan Substansi RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah



Kinerja Pelayanan **DISKOMINFOSIP**

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKU																	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Komunikasi, Informatika dan Persandian	Persen	0	0	80	90	90	0	0	N/A	74.08	76.74	0.00	0.00	0.00	82.31	85.27
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	0	72	62	69	79	0	60	91.58	80.02	76.44	0.00	83.33	147.71	115.97	96.76
3	Indeks SPBE	Nilai	0	2	2.6	3	2.35	0	1.54	1.9	2.15	2.42	0.00	77.00	73.08	71.67	102.98
4	Indeks IPS	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	1.8	0	0	N/A	1.6	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	107.78
5	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	30	33	44	56	0	30	43	45	56	0.00	100.00	130.30	102.27	100.00
6	Nilai AKIP	Predikat	0	B	B	BB	BB	0	B	B	B	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IKK																	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Komunikasi, Informatika dan Persandian	Skor	N/A	N/A	80	90	90	N/A	N/A	N/A	74.08	76.74	0.00	0.00	0.00	82.31	0.00
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Persen	0	0	62	69	79	0	62	79	80.2	76.44	0.00	0.00	127.42	116.23	0.00
3	Indeks SPBE	Skor	0	0	2.6	3	2.35	0	1.54	1.9	2.15	2.42	0.00	0.00	73.08	71.67	102.98
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	0	0	91	100	100	0	91	91	100	76.44	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
5	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	0	0	100	100	100	0	52	100	100	76.44	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	Persen	0	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
7	Indeks evaluasi SPBE	Indeks Hasil	0	0	2.6	3	2.35	0	1.54	1.9	2.15	2.42	0.00	0.00	73.08	71.67	102.98
8	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	33	44	56	0	22	33	44	24,11	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	0	0	31	44	56	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anggaran dan Realisasi Pendanaan DISKOMINFOSIP

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR YANG DILAKUKAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	870,597,940	3,090,153,851	3,327,684,704	3,126,186,700	3,560,881,460	735,043,035	3,018,286,291	3,125,126,623	3,088,815,884	3,496,391,190	84.43	97.67	93.91	98.80	98.19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI															
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	397,122,000	-	-	-	-	395,168,000	-	-	-	-	99.51	-	-	-	-
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	936,343,600	-	-	-	-	914,607,910	-	-	-	-	97.68	-	-	-	-
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	29,105,600	-	-	-	-	29,105,600	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI)	223,500,000	-	-	-	-	222,844,000	-	-	-	-	99.71	-	-	-	-
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	219,020,016	156,569,520	83,034,000	64,000,500	-	218,229,641	152,328,105	81,965,575	63,606,100	-	99.64	97.29	98.71	99.38
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	-	343,617,800	326,686,800	214,110,000	174,585,000	-	342,935,100	324,846,330	211,179,000	174,311,500	-	99.80	99.44	98.63	99.84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	1,450,072,800	356,523,240	46,067,600	49,625,600	-	1,347,481,765	349,499,280	45,925,480	48,825,324	-	92.93	98.03	99.69	98.39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	27,285,800	11,854,120	15,674,000	15,659,000	-	24,541,800	11,670,140	15,506,665	15,579,500	-	89.94	98.45	98.93	99.49
T O T A L	2,456,669,140	5,130,150,267	4,179,318,384	3,485,072,300	3,864,751,560	2,296,768,545	4,951,474,597	3,963,470,478	3,443,392,604	3,798,713,614	93.49	96.52	94.84	98.80	98.29

Permasalahan yang dihadapi DISKOMINFOSIP

- ❖ **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum di Implementasikan secara Optimal**
- ❖ **Ketersediaan sistem informasi atau basis data terpadu, idealnya setiap bidang memiliki database masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan Perangkat Daerah secara berkala. Dengan basis data yang valid dan perangkat daerah maka program kegiatan yang dilaksanakan akan dapat terukur secara pasti**
- ❖ **Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan Infrastruktur Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**
- ❖ **Kapasitas pemahaman aparatur/SDM terhadap tupoksi masing-masing, dan regulasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tupoksinya tersebut, oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknis melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Isu Strategis DISKOMINFOSIP

- Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab**
- Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat**
- Penguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah Kabupaten Mamuju**
- Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Mamuju**
- Peningkatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Mamuju**
- Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan satu data yang terintegrasi dan berbagi pakai**
- Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan andal**
- Pengembangan sumber daya aparatur di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang menguasai teknologi informasi**

Tujuan, Sasaran dan Indikator DISKOMINFOSIP

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan :
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tujuan : Optimalisasi Pelaksanaan e-Government dengan Mewujudkan Transformasi Digital yang Aman Berbasis Data

Indikator Tujuan : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik bagi Masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Sasaran 4 : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah

Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

→ **Indikator Sasaran 1 : Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik**

→ **Indikator Sasaran 2 : Persentase Layanan Publik yang di selenggarakan secara Online dan Terintegrasi**

→ **Indikator Sasaran 3 : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**

→ **Indikator Sasaran 4 : Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

→ **Indikator Sasaran 5 : Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Nilai AKIP)**

Strategi dan Arah Kebijakan DISKOMINFOSIP

Operasionalisasi NSPK
Urusan Pemerintahan
Wajib yang Tidak
Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar : Urusan
Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan
Persandian

Arah Kebijakan RPJMD :

Mewujudkan
Penyelenggaraan Tata
Kelola Pemerintahan yang
Akuntabel dan
Profesional

Akar Masalah :

- 1. Aspek Sumberdaya Manusia**
- 2. Aspek Infrastruktur dan Teknologi**
- 3. Aspek Regulasi dan Kebijakan**
- 4. Aspek Anggaran dan Koordinasi**

Arah Kebijakan DISKOMINFOSIP :

Transformasi Digital
dalam Tata Kelola
Pemerintahan yang di
dukung oleh
Infrastruktur yang
Andal, SDM yang
Kompeten dan
Regulasi yang jelas
untuk mencapai
Pemerintahan yang
lebih Akuntabel dan
Profesional

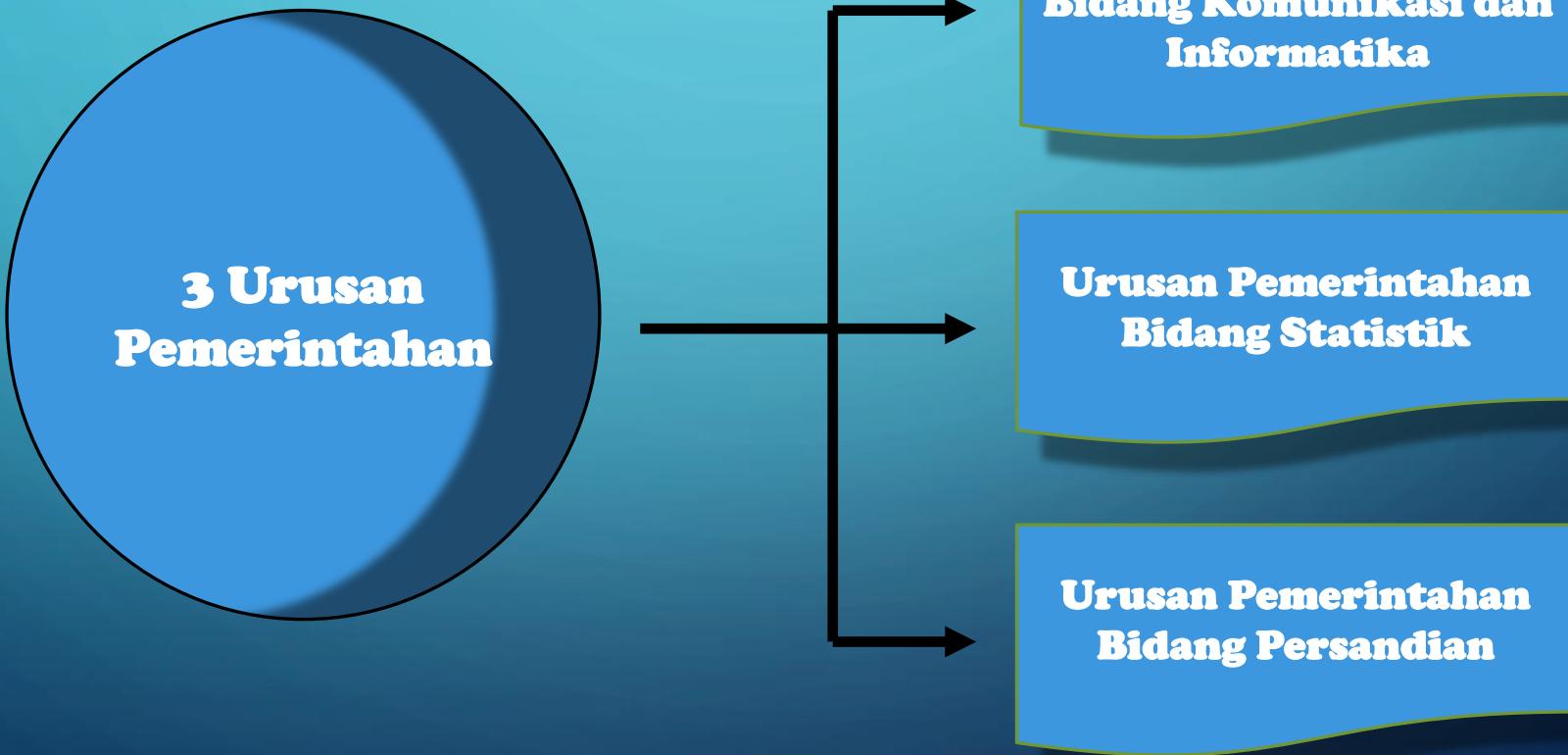
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan **DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju**

Tahun 2025 - 2029



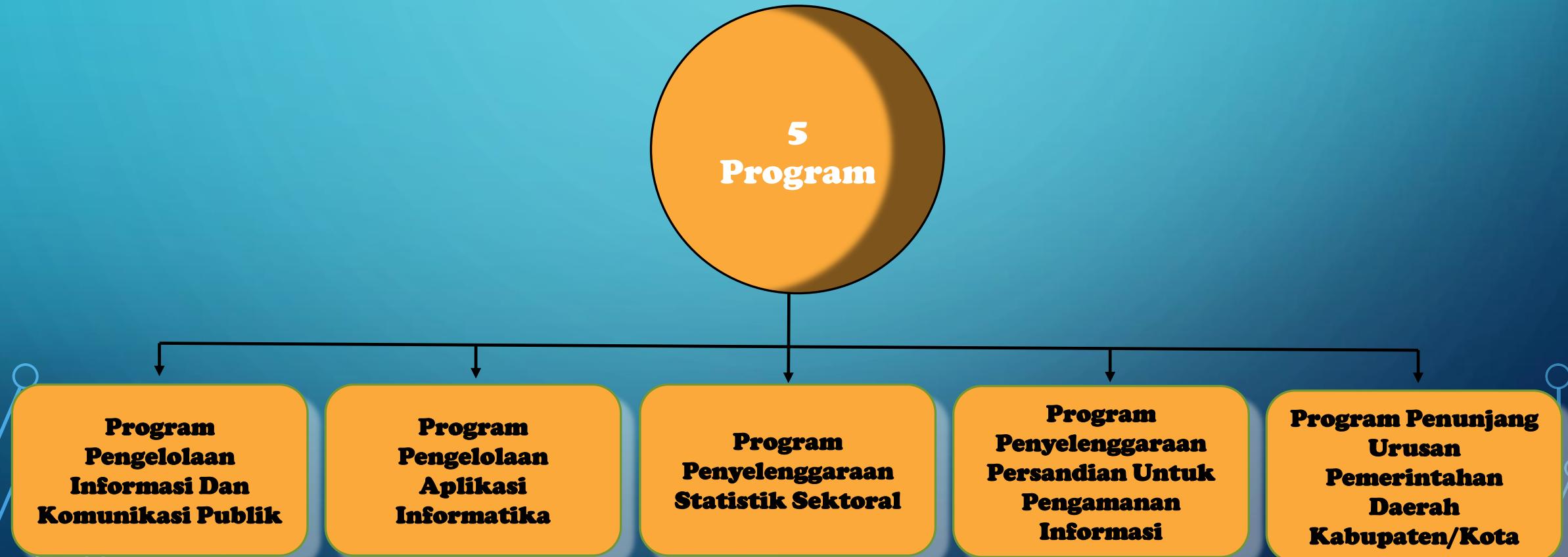
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan **DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju**

Tahun 2025 - 2029



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan **DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju**

Tahun 2025 - 2029



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju

Tahun 2025 - 2029

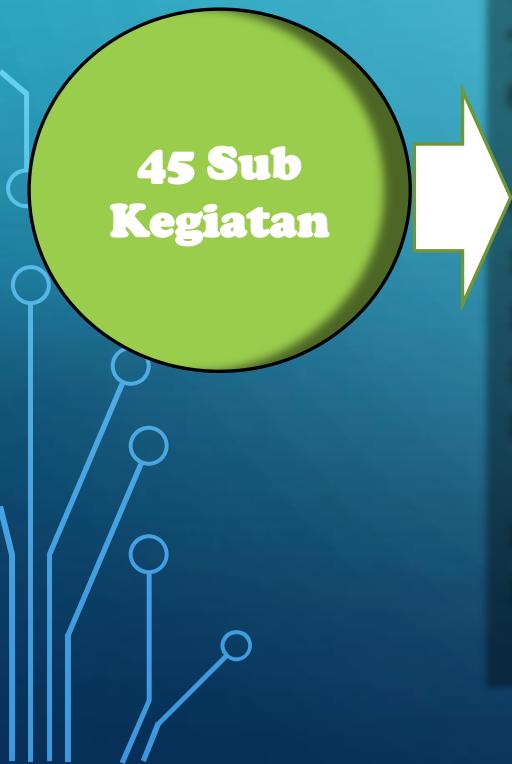
12
Kegiatan

- 
- 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 - 3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - 4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 - 5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 8. Kegiatan Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah**
 - 9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**
 - 12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan **DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju**

Tahun 2025 - 2029

**45 Sub
Kegiatan**

- 
- 1. Relasi Media**
 - 2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat**
 - 3. Pelayanan Informasi Publik**
 - 4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik**
 - 5. Diseminasi Informasi**
 - 6. Penyusunan Konten**
 - 7. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**
 - 8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan**
 - 9. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi**
 - 10. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia**
 - 11. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral**
 - 12. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar**
 - 13. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**
 - 14. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah**
 - 15. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan **DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju**

Tahun 2025 - 2029

**45 Sub
Kegiatan**

- 
- 16. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah**
 - 17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
 - 18. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD**
 - 19. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**
 - 20. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD**
 - 21. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD**
 - 22. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 23. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah**
 - 24. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang di Ampuh
Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
 - 25. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN**
 - 26. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD**
 - 27. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**
 - 28. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**
 - 29. Rekonsiliasai dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**
 - 30. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**
 - 31. Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya**

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan **DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju**

Tahun 2025 - 2029

**45 Sub
Kegiatan**

- 
- 32. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**
 - 33. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
 - 34. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
 - 35. Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
 - 36. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
 - 37. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
 - 38. Pengadaan Mebel**
 - 39. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 - 40. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
 - 41. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
 - 42. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
 - 43. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan**
 - 44. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 - 45. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator Kinerja Utama (IKU)

DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju

Tahun 2025 - 2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,50	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
2.	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	65	70	75	80	85	90
3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	60	70	80	90	100
4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,94	2	2,15	2,15	2,45	2,75
5.	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	50	60	70	80	90	100
6.	Nilai AKIP	Predikat	BB	BB	A	A	AA	AA

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju

Tahun 2025 - 2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	60	70	80	90	100
	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	65	70	75	80	85	90
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,94	2	2,15	2,15	2,45	2,75
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	50	60	70	80	90	100

terima
kasih



<https://diskominfosip.mamujukab.go.id>



@diskominfosip_mamuju



Diskominfosip Kabupaten Mamuju

